

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

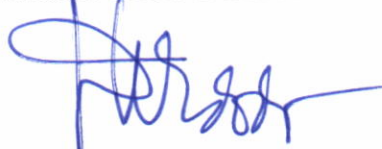
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini;
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperbaharui secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Juli 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



DODY WIDODO

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
3. Peringgal.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI SK SEKJEN NOMOR 28 TAHUN 2022						
No.	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (Berisi Urutan)		Jangka Waktu	
			Dibuka	Ditutup	Aktif	Inaktif
1	Data dan Informasi Individu Perusahaan (meliputi Data Identitas Individu, Legalitas, Nilai Investasi, Tenaga Kerja, Kapasitas Produksi dan Utilitas/Produksi)	UU KIP pasal 17 huruf b	Informasi rentan disalahgunakan serta dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.)	Jika (informasi yang tersedia secara agregat, rentan memunculkan interpretasi yang salah terhadap kinerja kelompok industri tertentu	Selama masih tersimpan di SIPNAS (Namun bisa tidak berlaku ketika perusahaan berstatus Tbk)	
2	Data dan informasi produksi perusahaan pemilik sertifikat TKDN (meliputi laporan produksi, bahan baku, nilai investasi, daftar relasi perusahaan, harga jual produk, dan harga produksi produk)	UU KIP pasal 17 huruf b	Dapat mengungkapkan data perusahaan yang bisa disalahgunakan oleh publik.	Mencegah penyalahgunaan data perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab		
3	Rancangan MoU Kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Untuk menghindari potensi di masyarakat dikarenakan informasi yang belum pasti	Hingga diterbitkannya MoU	fasul berkala, rancangan MoU setiap saat bisa ada yg di kecualikan sehingga ditambahkan jika selanjutnya masih dirahasiakan maka bisa dicekualikan
4	Data Gaji Pegawai	Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data gaji oleh pihak yang tidak bertanggung jawab		
5	SK Penjatihan Hukuman Disiplin Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i (atau huruf h)	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab		
6	pelebaran untuk draft/Proses penugasan kasus industri, lindunguping, subsidi, dan safeguard kami serahkan kembali kepada KPAI sesuai Tujuanya					
7	Draft/proses/data penyelesaian kasus/perikara permasalahan yg terkait dgn industri dan atau Kementerian, bisa dibuat juga sebagai permasalahan hukum di lingkungan Kementerian. dibagi menjadi 2 yaitu soal litigasi dan litigasi NON LITIGASI (Pidana berupa pendampingan, mediasi, dokumen yang dicekualikan yaitu: nota dinas, laporan polisi, laporan hasil penyelidikan permasalahan, pertimbangan hukum dan kemudahan LITIGIASI (Tata Usaha Negara dan Perdata) dokumen yang di kecualikan yaitu: gugatan, jawaban, replik, duplik kesimpulan, alat bukti dan nota-nota dinas yang berkaitan.					
8	Data hasil asesmen pegawai	UU No. 14 2008 pal 17h				
9	Dokumen Keuangan: 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Exercise/perhitungan RAPBN Kementerian Perindustrian (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 7. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit; 10. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D); dan 11. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Sampai dengan Dokumen final		
10	Dokumen Barang Milik Negara (BMN):					
11	Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);	UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf i	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Sampai dengan Dokumen final	Dapat diberikan apabila untuk keperluan audit, proses penegakan hukum, dan atau keperluan lain	
12	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);					
13	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;					
14	Laporan Pengaduan Masyarakat (lampiran)					
15	Data Individu perusahaan (Realisasi Ekspor - Impor, negara tujuan ekspor, negara asal impor, nilai produksi, bahan baku, penggunaan energi/jenis mesin)	uu Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 17 huruf b	Apabila Informasi ini dibuka dapat terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu			
16	Data Pribadi (Personal) File Pegawai, Kompetensi Pegawai – OSDM	UU RI No. 14 Tahun 2008 pal. 17	Memengaruhi hasil keputusan baperjakt	Memperincir proses karir dan kenderiaast	selama masih berlaku	
17	Data Pribadi Peserta Didik	UU KIP Pasal 17 ayat h.1	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku	
18	Data Pribadi Pegawai Didak	UU KIP Pasal 17 ayat h.1	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku	
19	Data Pribadi Asesor Didak	UU KIP Pasal 17 ayat h.1	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku	
20	Hasil Uji Kompetensi	UU KIP Pasal 17 ayat h.4	Terungkapnya kapabilitas/kompetensi semua peserta didik	Mencegah persaingan yang tidak sehat dalam merekrut lulusan diklat	selama masih berlaku	
21	Nilai Peserta	UU KIP Pasal 17 ayat h.4	Terungkapnya kapabilitas semua peserta diklat	Mencegah persaingan yang tidak sehat dalam merekrut lulusan diklat	selama masih berlaku	
22	Modul / Materi Diklat	UU ITR, UU Hak Cipta	Semua orang dapat mengakses materi diklat melalui internet	Mencegah bahwa hanya peserta yang ikut diklat saja yang dapat mengakses materi / e-learning	selama masih berlaku	

23	Proses hingga hasil karya animasi	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf b - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atau kumpulan riptan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya	selama masih berlaku		
24	Proses hingga hasil karya desain seni	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf g - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atau karya seni terapan	selama masih berlaku		
25	Proses hingga hasil karya berupa aplikasi, software, dan/atau program komputer	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf s - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atau karya berupa program komputer	selama masih berlaku		
26	Proses hingga hasil karya game	- UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf r - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Apabila dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan komersial demi keuntungan pribadi.	Melindungi hak cipta seseorang atau kelompok atau karya berupa permainan video	selama masih berlaku		
27	Daftar rekening pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab			
28	Daftar rekening asesor, pengajar, instruktur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab			
29	Daftar rekening peserta dan alumni diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab			
30	Data dan informasi individu mitra industri yang bekerjasama (misal: IIP, profil tenaga kerja, legalitas)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi rentan disalahgunakan serta dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah penyalahgunaan data mitra industri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.			
31	Dokumen arsip kepegawaian pegawai aktif dan pensiunan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih tersimpan di bagian kepegawaian		(BPRDME)
32	Data peserta jauh penerimaan pendidikan vokasi industri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih tersimpan		
33	Data peserta diklat industri dan diklat aparatur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat h	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih tersimpan		
34	Proses Hasil Karya Ilmiah Siswa yang sudah dipatenkan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi rentan disalahgunakan serta dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah penyalahgunaan data mitra industri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	selama masih berlaku		SMAKPA
35	Hasil tes kemampuan calon peserta didik	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data mitra industri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMAKPA
36	Dokumen Penilaian Kinerja Guru (PKG)	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data mitra industri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	selama masih berlaku		SMAKPA
37	Naskah soal UN/UNBK/Usek/USBK/Awesem dll	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf f	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data mitra industri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	selama masih berlaku		SMAKPA
38	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dari Peryodie Barang/ Jasa	Pasal 17 UU KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMTI Makassar
39	Dokumen hasil atau proses perjabatan hukuman disiplin /pelanggaran etika guru, pegawai dan siswa	Pasal 17 UU KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMTI Makassar
40	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 UU KIP	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMTI Makassar
41	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Pasal 17 UU KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMTI Makassar
42	Soal jawaban, nilai tes ujian masuk/ JARVIS	Pasal 17 UU KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	selama masih berlaku		SMTI Makassar
43	Identitas PNS yang mengajukan lamaran/perkawinan di lingkungan SMK SMTI Bandar Lampung	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		SMK SMTI Bandar Lampung
44	Dokumen pengangkatan, peninjauan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		SMK SMTI Bandar Lampung
45	Laporan keuangan tahun berjalan / belum audited	UU No.17/2003 (Keuangan negara); UU no.1/2004	Penyalahgunaan pihak lain dan menghambat kebijakan karena adanya	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai Proses Audit Seleksi		SMK SMTI Bandar Lampung
46	Disposisi surat pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses pemerintahan/ kebijakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		SMK SMTI Bandar Lampung
47	Formulasi produk pada Teaching Factory SMK SMTI Bandar Lampung	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		SMK SMTI Bandar Lampung
48	Kode akses elektronik	UU No.14 th 2008 huruf l; No.11 thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 16	Penyalahgunaan pihak lain	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		SMK SMTI Bandar Lampung
49	Daftar dan Rincian data pribadi dari Perusahaan penguasa dalam seleksi Penghargaan Rintisan Teknologi Industri	Pasal 17 UU KIP	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		Pusat OPTIKI
50	Daftar dan Rincian data pribadi dari Perusahaan penguasa dalam seleksi Inkuibasi	Pasal 17 UU KIP	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		Pusat OPTIKI
51	Daftar dan Rincian data pribadi dari Perusahaan penguasa dalam seleksi DAPATI	Pasal 17 UU KIP	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		Pusat OPTIKI
52	Rincian data pribadi dari Perusahaan penguasa mengikuti assesment INDI 4.0	Pasal 17 UU KIP	Data dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan	Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak Terbatas		Pusat OPTIKI
53	Rekomendasi Daftar Penerima Fasilitas Pembiayaan Ekspor	UU No 14, Pal 17.b					
54	Rincian data tiap perusahaan penerima Trade Remedies	UU No 14, Pal 17.b					
55	Rincian data tiap perusahaan penerima insentif fiskal dan non fiskal	UU No 14, Pal 17.b					
56	Rincian data tiap perusahaan yang disubmit untuk urusan insentif	UU No 14, Pal 17.b					